



KORUPSI POLITIK DAN GAGALNYA PEMBANGUNAN DI GUINEA KHATULISTIWA

Justinus Devian Maheswara

19/446093/SP/29178

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji hubungan antara korupsi politik dan pembangunan di Guinea Khatulistiwa, khususnya setelah sumber daya minyak ditemukan pada tahun 1995 dan menjadi sumber pendapatan nasional utama pada masa pemerintahan Teodoro Obiang Nguema. Terima kasih untuk cadangan dan produksi minyaknya yang besar, Guinea Khatulistiwa telah menjadi salah satu negara terkaya di Afrika Sub-Sahara. Meskipun demikian, lebih dari 70% penduduknya hidup dalam kemiskinan yang disertai dengan kurangnya akses maupun kualitas terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini menumbuhkan dugaan terdapatnya peran korupsi politik terhadap kondisi tersebut. Dengan menggunakan kerangka konseptual korupsi politik dari Inge Amundsen dan model pembangunan Denis Goulet, skripsi ini tidak hanya mengeksplorasi jenis dan motivasi korupsi politik, melainkan juga menggali lebih dalam mengenai bagaimana korupsi politik melemahkan institusi, mengikis kepercayaan publik, dan mendistorsi pengalokasian sumber daya di Guinea Khatulistiwa.

Kata-kata kunci: Guinea Khatulistiwa; korupsi politik; pembangunan; kesenjangan; hak asasi manusia

ABSTRACT

This study examines the relations between political corruption and development in Equatorial Guinea, especially after oil resources were discovered in 1995 and became the main source of national income during the reign of Teodoro Obiang Nguema. Thanks to its large oil reserves and production, Equatorial Guinea has become one of the richest countries in Sub-Saharan Africa. Despite that, more than 70% of the population lives in poverty, accompanied by minimal access and quality to basic needs such as health and education. It gives rise to arguments that political corruption plays a role in this condition. Using Inge Amundsen's conceptual framework of political corruption and Denis Goulet's development model, this study not only explores the types and motivations of political corruption, but also digs deeper into how political corruption weakens institutions, erodes public trust, and distorts resource allocation in Equatorial Guinea.

Key words: Equatorial Guinea; political corruption; development; inequality; human rights